



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDAPATAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SARIPUDDIN. D
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 723461

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 2.910.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m<sup>2</sup>/128 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 494 m<sup>2</sup>/287.5 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 130 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m<sup>2</sup>/126 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 1200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 2000 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 155.000.000
7. Tanah Seluas 2000 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 155.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 240.700.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, HONDA TRAIL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



4. LAINNYA, GENIO SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 119.881.662

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.302.081.662

III. HUTANG Rp. 60.400.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.241.681.662

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.